



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKAHIR
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 673364

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 995.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.390.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/153 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 307.800.000

1. MOBIL, FORD ECOSPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 203.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 190.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.275.187.130

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.552.987.130

III. HUTANG

Rp. 9.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.543.987.130



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.